

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Sujanto, 1986, *Psikologi Umum*. Jakarta, Aksara.
- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintah Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar Saiful, , 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta.
- Ardiansyah, 2023, *Hukum Perizinan* , Deepublish, Yogyakarta.
- Atmosudirjo, Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*. Ghlmia Indonesia, Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Diana Hlmim Koencoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghlmia Indonesia, Bogor.
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Salemba Empat, Bandung.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2004, *Teori Akutansi*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie, 1994, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet. Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm 11.
- Jimly Asshidiqie, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Prasada.

- Jimly Assidique, 2004, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- John Salindeho, 1998, *Masalah Tanah dan Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, , 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung, Nuansa Cendikia.
- Kartini Kartono, 2002, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Manulang, M, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, 2010, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- R. Terry, George, 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rawan Soejito, 1981, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- RM.A.B.Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Siswanto, H. B, 2009, *Pengantar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat, 2004, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghlmia Indonesia, Bogor.
- Sondang P Siagian, 2004, *Manajemen Strategik*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Suharizal, Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Sujanto, 1990, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Gubernur; Kedudukan, Peran dan Kewenangannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Y.Sri Padyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Gramedia, Jakarta.

B. Jurnal

- A Zarkasi, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, 2011.
- Akbar Prasetyo Sanduan, Resentralisasi Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.5, No.1, 2022.
- Ali Marwan Hsb & Evlyn Martha Julianthy, Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Anisa Dwi Rachmadika, A Zarkasi, Syamsir "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis", *Journal Inovative*, Vol.4, No.3, 2024.
- Ardani, Mira Novana. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan)." *Law, Development and Justice Review*, Vol 3. No , 2020.
- Ardani, Mira Novana. Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). *Law, Development and Justice Review* , Vol 3. No 2, 2020.
- Ardani, Mira Novana. Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). *Law, Development and Justice Review*, Vol 3. No 2, 2020.

- Arisanti, Desi, Dasman Lanin, and Jumiati Jumiati. "Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dalam Mengawasi Peredaran Makanan Kemasan." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol 1. No 1, 2019.
- Desi Arianing Arrum, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia," *Jurist-Diction*, Vol 2, No. 5. 2019.
- Edoar Padli dan Fauzi Syam, Mekanisme Pembentukan Peraturan DPRD Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, *Journal Mendapo*, Vol.1.No.2,2020.
- Fauzin, Fauzin. "Pengaturan impor pangan negara indonesia yang berbasis pada kedaulatan pangan." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Vol 14. No 1, 2021.
- Febrian Chandra, Adhithiya Diar dan Hartati, Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan, *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol. 4, No.3, 2024.
- Florita, Aina, Jumiati Jumiati, and Adil Mubarak. "pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, Vol 1. No 1, 2019.
- Harjono, Dhaniswara K. "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Hukum to-ra*, Vol 6. No 2, 2020.
- Helmi, *Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2,2011.
- Helmi, Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan Di Indonesia, *Jurnal Sains Sosio humaniora*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Herma Yanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*,
- Hidayat, Adriansyah, and Muhammad Yafiz. Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol 1. No 4, 2023.
- Jumadil, Moh Rizky A., et al. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. *Jurnal Yustisiabel*, Vol 7. No 1, 2023.

- Khair, Otti Ilham. Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Vol 3. No 2, 2021.
- Latifah Amir, Kewenangan Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan dengan Dilaksanakannya Perda Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *Journal Unja*. Diakses tanggal 18 Oktober 2024, 22.10 WIB.
- Lestariningsy, Twotik, and Muhammad Roqib. "Perlindungan data pribadi pengguna sistem layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Basic Approach)." *Jurnal Jendela Hukum*, Vol 8. No 2, 2021.
- Marbun, Eldbert Christanto Anaya. Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, No 2. Vol 3, 2023.
- Muhammad Roqib, Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (risk basic approach), *Jurnal Jendela Hukum*, Gresik, 2020.
- Nazaruddin Latif, Tinjauan Yuridis tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2017.
- Nirboyo, Ade Juang. "Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko." *Jatiswara* , Vol 6. No 2, 2021.
- Nurramadhania, Almadina. "Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 3. No 1 2023.
- Palupi, Fitria Hayu, Titik Dwi Noviyati, and Ahmad Aufar Ribhi. "Sosialisasi penyuluhan keamanan pangan pada UMKM." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, Vol 1. No 4, 2023.
- Pambudi, Andi Setyo, and Rahmat Hidayat. "Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional." *Bappenas Working Papers*, Vol 5. No 2, 2022.
- Prawira, Aldiansyah Yudha, Tri Setiady, and I. Ketut Astawa. Peranan Hukum Perizinan Dalam Kemudahan Investasi Asing Demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi. *YUSTISI*, Vol 11. No 1, 2024.

Retnadumillah Saliha, Perizinan Pertambangan Batuan dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berwawasan Lingkungan, *Jurnal Katalogis*, Vol 5, No 2, 2017.

Rizkyana Zaffrinda Putri dan Lita Tyesta A.L.W, Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No.2, 2015.

Rokhman, Bakhrur, Ali Rokhman, and Denok Kurniasih. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, Vol 6. No 1, 2024.

Sukamto Satoto dan Bahder Johan Nasution, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 3 Nomor 1 Juni 2019.

Sulistiyani Eka Lestari Dan Hardito Djanggih, Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakkannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 4, No.2, 2019.

Yuningsih, Rahmi. Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* , Vol 12. No , 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, LNRI Tahun 2014 Nomor 224, TLNRI Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LNRI Tahun 2006 Nomor 124, TLNRI Nomor 5475.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LNRI Tahun 2022 Nomor 238, TLNRI Nomor 6841.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, LNRI Tahun 2012 Nomor 227, TLNRI Nomor 5360.